

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1987, sebuah laporan dipublikasikan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED), sebuah lembaga bentukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengkaji penyebab degradasi lingkungan, hubungan antara keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, permasalahan lingkungan serta mengembangkan solusi kebijakan yang mengintegrasikan ketiganya. Laporan itu terkenal sebagai *Brundtland report* atau yang juga dikenal dengan nama *Our Common Future*. Laporan ini terkenal karena kontribusinya dalam mendefinisikan konsep *sustainable development* dan menggambarkan cara-cara untuk meraihnya. Berdasarkan laporan ini, *sustainable development* didefinisikan sebagai “suatu pengembangan yang memberikan kapabilitas bagi generasi masa kini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mengancam kapabilitas generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa mendatang”. Hal senada diungkapkan oleh (Reddy & Gordon, 2010), mengutip dari penelitian Ofstad pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa rangkaian tindakan inisiatif akan membuat sumber daya alam dieksploitasi seminimal mungkin dan pembuangan limbah dan polutan akan berkurang dalam siklus hidup sehingga tidak membahayakan kepentingan generasi mendatang (Reddy & Gordon, 2010).

Pada tahun 1994, John Elkington, seorang konsultan manajemen terkemuka di Amerika Serikat, memperkenalkan istilah *Triple Bottom Line*. Teori *Triple Bottom Line* terkenal dengan slogan People, Planet, Profit. *Triple Bottom Line* adalah suatu *framework* teoritis yang menekankan bahwa perusahaan tidak hanya

menekankan profit sebagai hal utama, namun juga aspek sosial dan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan keberlanjutan perusahaan. Kemunculan *Brundtland Report* dan *Triple Bottom Line Theory* John Elkington kiranya dapat sedikit memberikan ilustrasi tentang sebuah transisi paradigma yang sebelumnya menganggap bahwa bisnis hanya berorientasi profit menjadi berorientasi sosial dan lingkungan.

Hal ini tentu tidak lepas dari fenomena *climate change*, fenomena kerusakan alam dan masalah sosial yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Sebagai contoh, fenomena kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat akibat kegiatan perusahaan dapat dilihat pada kasus berikut: Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) untuk PT Kahatex. PT Kahatex merupakan salah satu perusahaan manufaktur di bidang tekstil yang berlokasi di Sumedang. Kasusnya dimulai dengan diterbitkannya IPLC oleh Bupati Sumedang. Penerbitan IPLC seharusnya menjadi jaminan bahwa limbah perusahaan tidak akan merusak lingkungan dan merugikan warga sekitar. Penerbitan IPLC seharusnya mempertimbangkan kelas air sungai. Kelas air sungai Cikijing yang jadi tempat pembuangan limbah PT Kahatex masuk dalam kategori kelas II menurut PP No. 82/2001 Pasal 55 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu sungai yang diperuntukkan bukan untuk industri, melainkan untuk rekreasi air, budidaya ikan, peternakan dan pengairan. Tapi kenyataannya, IPLC tetap diterbitkan untuk PT Kahatex sehingga PT Kahatex bisa membuang limbah di sungai Cikijing. Akibatnya, limbah PT Kahatex merusak sawah warga seluas 752 hektare. Menurut hasil pengujian tim Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumedang, hasil panen padi yang normal 6 ton per hektare berkurang jadi 0,5 ton per hektare akibat pencemaran ini. Nah, masyarakat sudah pernah menggugat Bupati Sumedang dan menang di Mahkamah Agung. Bupati Sumedang diwajibkan mencabut IPLC. Tapi, Bupati Sumedang malah menerbitkan izin baru. (Pikiran Rakyat, 2018)

Kasus serupa terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah. PT Rayon Utama Makmur (RUM) adalah pabrik pembuatan serat rayon. Hasil produksi pabrik menghasilkan limbah H<sub>2</sub>S yang membuat warga sekitar mencium bau busuk dalam kehidupan mereka sehari-hari. Warga setempat dan perusahaan pernah membuat kesepakatan yang disaksikan langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo. Isi dari kesepakatan itu antara lain, PT RUM harus menghentikan sementara kegiatan produksi jika dalam waktu satu bulan tidak dapat mengatasi bau dari limbah tersebut. Penghentian sementara itu berlaku sampai perusahaan menyediakan instalasi *sulfur avoid (H<sub>2</sub>S<sub>04</sub>) recovery*. Nyatanya, perusahaan tetap menjalankan kegiatan produksi, meskipun perusahaan gagal mengatasi bau tersebut dan tidak kunjung menyediakan instalasi H<sub>2</sub>S<sub>04</sub> recovery. Sampai-sampai, Bupati Sukoharjo turun tangan dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 660.1/207/2018 yang meminta PT RUM menghentikan sementara kegiatan produksi dan memberikan waktu 18 bulan untuk PT RUM guna menyelesaikan masalah ini. Setelah 18 bulanpun, PT RUM masih tetap berproduksi meskipun masalah bau limbah belum terselesaikan. PT RUM berdalih bahwa H<sub>2</sub>S<sub>04</sub> recovery sudah dipesan, namun terlambat dikarenakan COVID-19. (EKONOMI, 2018)

Hal yang sedikit berbeda terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pabrik farmasi PT. Combiphar membuang air boiler langsung ke sungai tanpa melalui Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) terlebih dahulu. Limbah air tersebut bersuhu diatas 50 derajat celcius yang melanggar aturan dari program Citarum Harum. Bedanya kasus ini dengan kasus-kasus sebelumnya adalah tindakan tegas dari aparat. Komandan Sektor 9 Satgas Citarum Harum langsung mengonfrontasi pihak pabrik yang berakhir dengan penutupan paksa saluran limbah air pabrik. Hasilnya, perusahaan kemudian segera melakukan perbaikan pengelolaan suhu air.

Contoh lainnya dapat kita lihat pada sebuah perusahaan sawit, PT London Sumatra, yang mendapatkan sanksi dari sebuah organisasi pengembang dan pengimplementasi standar internasional untuk produksi CPO yang sustainable,

**Ricky Dewangga Putra Nugraha, 2023 PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN DAN KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI INDONESIA**

**Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu**

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sanksi tersebut berupa penangguhan sertifikat RSPO kepada PT London Sumatra. Sanksi tersebut dijatuhkan karena RSPO menganggap perusahaan tersebut melanggar standar prinsip dan kriteria mereka dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. (CNN Indonesia, 2019) Akibat dari penjatuhan sanksi ini, laba perusahaan pada tahun 2018 sebesar Rp 329.426.000.000 turun menjadi Rp 252.630.000.000, atau turun sebesar 30%. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada PT Salim Ivomas Pratama Tbk untuk alasan yang sama pada tahun yang sama. (Merdeka, 2019) Akibat dari penjatuhan sanksi ini, rugi perusahaan pada tahun 2018 sebesar (Rp 178.067.000.000) bertambah menjadi (Rp 642.202.000.000) pada tahun 2019, atau bertambah sebesar 72%.

Kita sudah melihat bagaimana perusahaan manufaktur merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Namun, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana caranya kita melihat apakah perusahaan sudah mempertimbangkan aspek sosial dan aspek lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya? *Sustainability report* adalah laporan yang dipublikasikan oleh perusahaan atau organisasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari perusahaan atau organisasi tersebut. *Sustainability report* juga menyajikan nilai dan model *governance* perusahaan dan menunjukkan hubungan antara strateginya dan komitmennya terhadap ekonomi global yang *sustainable*. *Sustainability report* dapat membantu perusahaan untuk mengukur, memahami dan mengkomunikasikan kinerja ekonomis, lingkungan, sosial dan *governance* mereka, kemudian menetapkan tujuan dan mengelola perubahan secara lebih efektif. *Sustainability report* adalah kunci utama dalam mengkomunikasikan kinerja *sustainability* dan dampaknya, baik positif maupun negatif. *Sustainability report* dapat dianggap serupa dengan istilah lain untuk melaporkan kinerja non-finansial: *triple bottom line reporting*, *CSR reporting*, dll. *Sustainability report* juga merupakan unsur intrinsik dalam laporan terintegrasi, sebuah pengembangan baru-baru ini yang menggabungkan analisis kinerja finansial dan nonfinansial. (Global Reporting Initiative, 2020)

**Ricky Dewangga Putra Nugraha, 2023 PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN DAN KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

PT Kahatex, PT RUM dan PT. Combiphar tidak pernah menerbitkan *sustainability report*. Padahal, dalam *sustainability report*, perusahaan diwajibkan mengungkapkan manajemen limbah. Sehingga, *sustainability report* mampu menjadi solusi untuk mencegah fenomena seperti ini terjadi lagi. Pemikiran ini sejalan dengan penelitian Bednarova et.al tahun 2019 yang meneliti pengaruh *environmental reporting* terhadap *environmental performance* di perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam top 100 Fortune Global Companies. Hasilnya, tingkat pengungkapan dimensi lingkungan berkorelasi dengan skor kinerja lingkungan perusahaan. (Bednárová et al., 2019). Penelitian serupa oleh Clarkson et.al juga mengatakan bahwa terdapat korelasi positif antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan kinerja lingkungan. Bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan lebih bersedia untuk mengungkapkan kinerja lingkungan mereka. (Clarkson et al., 2008). Begitu pula dengan Al-Tuwaijri yang menyatakan bahwa terdapat korelasi signifikan antara kinerja lingkungan dengan tingkat pengungkapan kinerja lingkungan perusahaan. (Al-tuwaijri & Ii, 2003) Di Indonesia, kita bisa melihat PT. Holcim sebagai contoh perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik. Hal ini bisa dilihat dalam *sustainability report* mereka di tahun 2017. Di sana, perusahaan mengungkapkan bahwa mereka memiliki divisi Geocycle yang mengelola tidak hanya limbah internal perusahaan, namun juga limbah pihak eksternal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahkan mempercayai mereka untuk mengurus penanganan limbah medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di seluruh Indonesia seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik kesehatan yang berisiko mengakibatkan penularan penyakit atau infeksi Nosokomial jika tidak segera dimusnahkan. Sejauh pengamatan peneliti, sepanjang tahun diterbitkannya *sustainability report*, PT. Holcim belum pernah tersangkut kasus pencemaran lingkungan sama sekali. (Jawapos, 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh Reddy dalam penelitiannya yang berjudul “*The Effect of Sustainability Reporting on Financial Performance: An Empirical Study Using Listed Companies*”. Dalam jurnal tersebut, dikatakan bahwa mengharuskan perusahaan untuk melaporkan secara periodik mengenai dampak

**Ricky Dewangga Putra Nugraha, 2023 PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN DAN KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

dari aktivitas mereka terhadap lingkungan memiliki beberapa kegunaan: (i) *Stakeholder* mengetahui kegiatan yang sedang berlangsung di perusahaan. (ii) *Stakeholder* memonitor dampak aktivitas tersebut terhadap lingkungan. (iii) Perusahaan atas masukan *stakeholder* dapat mengimplementasikan strategi untuk meminimalisir dampak dari aktivitas tersebut. (Reddy & Gordon, 2010)

Dari contoh-contoh tersebut, dapat dilihat bagaimana kinerja lingkungan dan kinerja sosial perusahaan mempengaruhi kinerja keuangannya. Apa itu kinerja lingkungan dan kinerja sosial? Kinerja lingkungan dapat diartikan sebagai kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green). (Titisari & Alviana, 2012) Sementara itu, kinerja sosial dapat diartikan sebagai tindakan yang tampak memajukan kepentingan umum, yang tidak mencakup apa yang sudah menjadi kewajiban hukum dan kepentingan perusahaan itu sendiri. (McWilliams & Siegel, 2001)

Namun demikian, perusahaan manufaktur di Indonesia nampaknya tidak menyadari atau mengabaikan transisi paradigma ini. Perusahaan manufaktur di Indonesia sepertinya tidak menganggap bahwa *people* dan *planet* atau aspek sosial dan lingkungan sebagai sesuatu yang sama pentingnya dengan laba untuk keberlanjutan usaha mereka. Hal ini dapat terlihat dari sedikitnya perusahaan manufaktur yang mempublikasikan *sustainability report*. Dari 204 perusahaan manufaktur di Indonesia, hanya 13 perusahaan pada tahun 2019-2020 yang menerbitkan *sustainability report* sejauh penelusuran peneliti. Mengapa penerbitan *sustainability report* menjadi sesuatu yang penting dalam kaitannya dengan pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan? Ada beragam definisi mengenai *sustainability report*. Susanto dan Tarigan dalam jurnalnya menulis bahwa menurut Elkington, (1997) SR berarti laporan yang mengandung baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan yang di dalamnya mencakup kegiatan CSR dan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan sehingga perusahaan dapat terus berkembang secara berkelanjutan. *Sustainability report* tidak hanya digunakan di lingkungan perusahaan, namun juga di lingkungan pemerintahan.

**Ricky Dewangga Putra Nugraha, 2023 PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN DAN KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI INDONESIA**

**Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu**

Misalnya, Kementerian Lingkungan dapat menilai kinerja usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan suatu instansi dalam setiap pelaporannya melalui *sustainability report*. Peraturan yang mengatur mengenai pengungkapan CSR ada di peraturan Bapepam dan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK no.51 tanggal 27 Juli 2017. Pengungkapannya ada yang bersifat *stand-alone*, namun tidak sedikit juga yang masih terintegrasi dengan laporan tahunan perusahaan (Gunawan, 2010)

Untuk membuat perusahaan mau menerbitkan *sustainability report* tentu bukan hal yang mudah. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan tetaplah sebuah lembaga yang berorientasi profit. Artinya, tanpa adanya aturan yang diberlakukan, akan lebih baik kiranya jika perusahaan memiliki dan mengetahui insentif untuk mengungkapkan *sustainability report*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Reddy (2010) bahwa mengungkapkan *sustainability* bisa jadi memerlukan biaya yang besar dan biaya tersebut sebagian besar ditanggung oleh para pemegang saham. Tanpa adanya *tangible benefit* dari *sustainability reporting*, tanpa adanya peraturan, motivasi pemegang saham untuk terus membiarkan perusahaan menyediakan *sustainability report* tetap perlu dipertanyakan (Reddy & Gordon, 2010).

Masalahnya, belum terdapat konsensus yang bersifat konklusif mengenai sejauh mana kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh kinerja sosial dan kinerja lingkungan mereka. Dalam penelitian Al-Tuwaijri et al., ditemukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Temuan ini konsisten dengan pandangan bahwa kinerja keuangan dan kinerja ekonomi berkaitan dengan kualitas manajemen. Manajer yang baik, demi kepentingan jangka panjang perusahaannya, menerima tanggung jawab dan mengadopsi langkah-langkah proaktif untuk mengendalikan polusi lingkungan. Temuan ini juga konsisten dengan preferensi investor untuk berinvestasi pada ekuitas perusahaan yang ramah lingkungan. (Al-tuwaijri & Ii, 2003). Temuan yang sama juga ditemukan dalam penelitian Haninun dan Lindrianasari. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja

**Ricky Dewangga Putra Nugraha, 2023 PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN DAN KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

keuangan. Temuan ini sejalan dengan *stakeholder theory* dan *legitimacy theory*, dimana perusahaan perlu menjaga hubungan antar pemangku kepentingannya, utamanya pemangku kepentingan yang mengontrol ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan demi keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan, dengan mengakomodasi kebutuhan dan keinginan mereka. Sementara itu, fokus dari *legitimacy theory* adalah interaksi perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan menunjukkan komitmennya atas manajemen lingkungan melalui partisipasi dalam program PROPER, yang berguna bagi *stakeholder* dan diharapkan mampu meningkatkan *image stakeholder* terutama konsumen sebagai pengguna produk yang dapat meningkatkan profit. (Haninun et al., 2018) Namun, temuan yang berbeda ditemukan oleh Sarumpaet. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa kinerja keuangan tidak terasosiasi signifikan dengan kinerja lingkungan. Temuan ini bukanlah suatu hal yang mengejutkan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Barang atau jasa yang ramah lingkungan biasanya lebih mahal harganya, sehingga tidak disukai oleh konsumen di Indonesia. Akibatnya, kinerja keuanganpun tidak menjadi lebih baik. (Sarumpaet, 2005) Dalam penelitian Orlitzky et al., ditemukan bahwa kinerja sosial berkorelasi positif dengan kinerja keuangan. Reputasi nampaknya merupakan mediator dari hubungan keduanya. (Orlitzky et al., 2003) Namun, temuan yang berbeda ditemukan oleh Fauzi et al. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara kinerja sosial dan kinerja keuangan. Tidak dijelaskan mengapa hubungan keduanya demikian, namun peneliti mengakui adanya potensi bias akibat sulitnya mencari aspek negatif dari kinerja sosial. Selain itu, tidak semua dimensi dari MJRA ditemukan. MJRA sendiri merupakan lembaga rating independen yang berbasis di Kanada. (Fauzi et al., 2007)

Dari uraian di atas, tampak jelas adanya *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk memberikan sumbangsih untuk mengisi *research gap* yang ada dengan melakukan penelitian berjudul, “Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Kinerja Sosial terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Indonesia”.

**Ricky Dewangga Putra Nugraha, 2023 PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN DAN KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, maka dirumuskanlah masalah penelitian ini dengan:

1. Apakah kinerja lingkungan dan kinerja sosial secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia?
2. Apakah kinerja lingkungan secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia?
3. Apakah kinerja sosial secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui:

1. Pengaruh kinerja lingkungan dan kinerja sosial secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. .Pengaruh kinerja lingkungan secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia.
3. Pengaruh kinerja sosial secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam perkembangan bidang ilmu akuntansi mengenai pengaruh kinerja lingkungan dan kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia, serta sebagai bahan referensi bagi pihak yang membutuhkan.

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Lewat penelitian ini, peneliti berharap untuk memberikan insentif kepada perusahaan untuk lebih memperhatikan kinerja lingkungan dan kinerja sosialnya dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan dan legitimasinya. Bagi pemerintah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan input kepada pemerintah dalam menerapkan kebijakan penilaian kinerja lingkungan dan kinerja sosial terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia.

